

RENCANA AKSI PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Keterangan
				2024	TW I	TW II	TW III	TW IV	
A	Tujuan I : Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Dipermasdes	Nilai Kematangan OPD	Angka	39				39	
1	Sasaran I : Meningkatkan Implementasi SAKIP Dipermasdes	Nilai SAKIP	angka	74,55				74,55	
a	Program Penunjang urusan Pemerintah Kabupaten / Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100				
		Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	50	50			
		Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	25	25	25	25	
		Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	100	25	25	25	25	
		Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	0	0	0	0	0	
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	25	25	25	25	
	<i>Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</i>	<i>Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja</i>	<i>persen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan pelaporan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	dokumen	1	1				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	dokumen	6	6	0			
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat daerah</i>	<i>Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti</i>	<i>persen</i>	<i>100</i>	<i>50</i>	<i>50</i>			

Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangan dibayar tepat waktu	Orang / Bulan	22 Orang / Bulan					
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	50	10	10	15	15	
Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	100	25	25	25	25	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	dokumen	12	3	3	3	3	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	dokumen	4		2		2	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang	laporan	12	3	3	3	3	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	1		1			
Administrasi Umum Perangkat daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat daerah	laporan	12	3	3	3	3	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket	12	3	3	3	3	
Penyediaan Bahan logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	paket	6	2	2	2	0	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	dokumen	12	3	3	3	3	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	3	3	3	3	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi	laporan	10	2	2	3	3	
Dukungan pelaksanaan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	4		2		2	
Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Prosentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	25	25	25	25	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	3	3	3	3	3	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan	12	3	3	3	3	3	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	laporan	2			1	1		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	12	3	3	3	3	3	
	pereliharaan barang milik daerah penunjang Urusan pemerintah daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Benunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	persen	100	25	25	25	25	25	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	unit	18	4	4	5	5	5	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	20	5	5	5	5	5	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara /Direhabilitasi	unit	1		1				
2	Tujuan II : Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Prosentase Jumlah Desa Maju dan Mandiri	persen	91,07						
	Sasaran I : Meningkatkan Jumlah Desa yang Naik Status	Jumlah Desa Naik Status	Desa	20					20	
1	Program Penataan Desa	Prosentase Desa Yang Difasilitasi terkait Penyelenggaraan Penataan Desa	persen	100					100	
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi terkait penyelenggaraan penataan desa	Desa	224					224	
	Facilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah dokumen hasil Facilitasi Penataan Wilayah Desa	dokumen	1		1				
	Facilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah dokumen Facilitasi Kegiatan Penataan Kewenangan Desa	dokumen	1		1				
	Facilitasi Sarana dan prasarana Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	dokumen	492	100	100	100	100	192	

	Program Peningkatan Kerjasama Desa	<i>Prosentase Desa yg melakukan kerjasama aktif (baik antar desa dan desa dengan pihak ketiga)</i>	Persen	74,55					74,55	
	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa	<i>Jumlah desa yang difasilitasi Kerja sama antar desa</i>	desa	6	2	2	2			
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten	dokumen	2		1			1	
	Fasilitasi Kerjasama antar desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	dokumen	6	1	2	2		1	
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa tertib administrasi pemerintahan Desa	persen	48,15					48,15	
	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	<i>Cakupan Desa yang tertib administrasi desa</i>	persen	224					224	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	dokumen	8	2	3	3			
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Penyusunan Produk Hukum Desa	dokumen	10		5	5			
	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	dokumen	224			224			
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	dokumen	224					224	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.	Jumlah pelatih/Trainer yang siap memberi BinteK Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	jumlah pelatih	18			18			
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	dokumen	3			3			
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDES Desa dan Lembaga Kerjasama antar desa.	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMdes, Lembaga Kerjasama Antar Desa	dokumen	3	1	1	1			
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	dokumen	224			224			
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	dokumen	3			3			
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	dokumen	2			2			

	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah pelatih yang siap memberi bintek BPD	Jumlah pelatih	18		18			
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	dokumen	3		3			
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Presentase lembaga kemasyarakatan aktif (pengurus, anggaran, program kerja, dan pertemuan)	persen	63,25				63,25	
	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat kabupaten /kota serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama pelakunya</i>	<i>Presentase lembaga kemasyarakatan yg dibina tingkat kabupaten</i>	<i>persen</i>	<i>63,25</i>				<i>63,25</i>	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa./kelurahan (RT,RW, PKK,Posyandu, LPM, dan Karangtaruna)lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yg ditingkatkan kapasitasnya	lembaga	5486	1371	1371	1371	1373	
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	paket	6			6		
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	dokumen	4	2	2			
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan	laporan	1		1			
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	laporan	8	2	2	2	2	

Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	dokumen	239	60	60	60	59	
---	--	---------	-----	----	----	----	----	--

Purbalingga, 1 April 2024
 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Purbalingga



ENI SOSIATMIAN, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19651220 198603 1 009